

Bahasa, Budaya Bisu Dan Produksi Ruang Pulau Semujur: Pemaknaan Resiliensi Dan Penindasan

Retno Wulan¹, Aji Royan Nugroho², Apriliyani Harahap³

¹Universitas Bangka Belitung

²Stikes Mira Husada

³Universitas Bangka Belitung

E-mail: retnowulan@ubb.ac.id¹, ajiroyan95@stikesmhk.ac.id², apriliyani@ubb.ac.id³

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: Pulau Semujur,
Produksi Ruang, Bahasa
Struktur Sosial, Budaya Bisu

Abstract: Dalam praktik keruangan, sebagian masyarakat di pulau semujur datang dari pulau lain sebagai upaya produksi sosial. Keruangan yang dihuni sebagai tempat baru bukanlah space yang kosong atau netral, melainkan terdapat proses sosial yang memiliki keterkaitan. Pada penelitian ini akan menguji bagaimana produksi sosial keruangan yang ada di Pulau Semujur dengan menggunakan teori triadik space Henri Lefebvre dan Budaya Bisu Paulo Freire. Proses keruangan itu meliputi Ruang yang dipraktikan, Representasi Ruang dan Ruang Representasional dengan praktik sosial, pola rutinitas masyarakat. Penelitian ini juga melihat bagaimana ruang itu dikonsepsikan oleh negara di pulau semujur sebagai tempat pulau yang terluar dengan bagaimana masyarakat mempraktikan ruang itu sebagai tempat penghidupan. Kemudian, bagaimana bahasa bisu hingga pendidikan yang membebaskan masih menjadi ketimpangan yang cuku kentara. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan pengambilan gambar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya konflik keruangan antara ruang representasi penguasa dengan praktik ruang dalam masyarakat. Kemudian, mengenai ruang representasional dapat dilihat dengan pengalaman keruangan di pulau semujur untuk bisa dihidupi lebih layak dari segi hak dasar masyarakat.

PENDAHULUAN

Meneroka Pulau Semujur yang lebih dekat juga akan melihat bagaimana masyarakat menghidupi dirinya dan menjalankan praktik-praktik sosial. Mereka melihat Pulau Semujur sebagai ruang baru untuk bisa dihuni dan memproduksi keruangan baru bersama keluarga inti. Besar masyarakat di Pulau Semujur datang dari wilayah lain di Indonesia, mereka menapaki dan menjelajah untuk menemukan apa yang bisa dimanfaatkan di pulau itu khususnya dalam hal kebaikan alam di bidang biota laut. Dalam praktik-praktik di pulau itu, masyarakat pendatang menjalankan peran sebagai nelayan atau pedagang dari hasil laut berupa ikan.

Sebagai pendatang, masyarakat mereka menghuni sebuah wadah atau ruang yang tidak lahir sendiri. Ruang yang bisa diartikan ada pergerakan, pertemuan-pertemuan yang sifatnya

transaksional atau pun komunikasi secara verbal, ruang yang ditempati selain bisa didapati dengan interaksi sosial juga ada pergerakan ruang yang dinamis. Kedatangan mereka di tempat yang baru menjadi *inhabitans* di ruang yang sebelumnya belum pernah mereka jumpai, kehadiran yang berbeda ini juga menimbulkan ketahanan dan adaptasi. Perjumpaan di Pulau Semujur tidak serta merta perjumpaan sosial belaka, namun di sini mereka akan menghadapi beberapa bentuk dari hal-hal yang merepresentasikan ruang kuasa dari negara yang berada di pulau itu atau di sekitar wilayah tersebut.

Praktik-praktik keruangan memperlihatkan keadaan ruang yang dinamis, ruang yang dihuni itu semakin mengalami perubahan. Perubahan pada pusat ruang yang dilewati masyarakat tepi yang juga dihadapkan pada kehadiran ruang-ruang kuasa di tengah keadaan sosial yang juga mengalami banyak kerentanan. Di dalam keruangan yang dialami tersebut memiliki kecenderungan-kecenderungan yang di dalamnya yang membentuk, yang mereproduksi, dan juga turut memberikan persepsi. Ruang-ruang yang dihuni itu saling mengalami keterkaitan dengan peristiwa sosial yang saling terjalin, dirinya saling bergerak mengikuti perjalanan waktu—ruang juga memiliki pola yang berubah-ubah dan berkembang—dari kepadatan ruang hingga berbagai aspek yang hadir dan terlibat dalam proses ruang itu dihidupkan oleh pelaku keruangan yaitu masyarakat. Ruang sosial bukanlah sesuatu yang terasing, bukan sebuah produk namun sesuatu yang diproduksi dan memiliki keterkaitan dengan hubungan sosial dan kehidupan yang berlanjut (Lefebvre, 1991).

Selanjutnya ada perbedaan bagaimana ruang yang mengalami perbedaan dari segi produksinya. Katakanlah ruang *Urban* dan *Suburban* yang memiliki kecenderungan mobilitas yang berbeda. Kemudian posisi pulau semujur sendiri bisa dikatakan lebih merujuk pada kondisi *Suburban* bahkan lebih dari itu. (Soja, n.d.) mengartikan wilayah *suburban* adalah wilayah yang ditempati dengan penduduk atau masyarakat yang tidak padat dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah dan dikatakan juga masyarakat tepi. Soja juga memandang wadah ruang yang sebenarnya sudah hadir di sana yang statis untuk keberlangsungan aktivitas-aktivitas masyarakat atau “*spatial illusions*”.

Bagian lain dari ruang yang menunjukkan keberadaan representasi dari ruang dalam hal ini mengenai konteks fasilitas publik atau ruang yang mewakili kekuasaan. Ruang kekuasaan dalam representasi yang dimunculkan dapat berupa simbol-simbol, nama, tanda-tanda. Dalam fungsinya juga tidak terlepas dari fungsi ruang sendiri yaitu jalan, gedung pelayanan, KUA, rumah sakit dan juga fasilitas keagamaan. Penggunaan ruang dalam penelitian ini ingin melihat dan menelusuri bagaimana representasi ruang dan praktik ruang yang bergerak dinamis di dalam ruang sosial dan aktivitas masyarakat yang bergerak dinamis—bentuk komunikasi, sentuhan dalam penggunaan ruang. Upaya-upaya untuk membongkar dimensi keruangan berdasarkan teori triad space untuk menganalisis konflik keruangan yang bertabrakan khususnya dari para pendatang.

Pada hal yang berikutnya representasi ruang yang digunakan seperti bangunan sekolah tidak terlihat dan menjadi bagian di masyarakat itu. Pendidikan masih mahal untuk bisa dijangkau dan dinikmati secara dekat dan pantas. Hadirnya pendidikan membuka akan pengetahuan horizontal yang cakup dalam membaca. Membaca dalam membangkitkan adanya sebuah kesadaran terhadap realitas atau keadaan lingkungan yang sedang dialami. Menurut Paulo Freire tentang kesadaran membaca yang tidak hanya membaca secara kalimat per kalimat namun lebih dari itu yaitu membangkitkan kesadaran untuk mengasah kepekaan yang kritis terhadap lingkungannya (Pongoh et al., 2022). Karenanya dalam pandangan Freire ini pendidikan masih memegang pada konsep-konsep peternalisme yaitu pendidikan yang dominan misalnya hanya transformasi pengetahuan dari guru ke murid saja tanpa adanya argumen bangunan kritis yang dihidupkan dari pendidikan itu.

Pada kasus pendidikan yang satu arah dan tidak berpihak, akan berakibat terhadap proses pendidikan yang bergantung kepada guru. Di mana murid dalam bahasa Freire sebagai kaum tertindas yang berakibat mereka akan kehilangan identitas dan tidak mengenal potensi dirinya, dan pemikiran-pemikiran mereka cenderung menyesuaikan apa yang dikatakan oleh gurunya (Freire et al., 2015). Menghadai di era abad dua satu itu, pandangan pendidikan menurut Freire harus mendekati terhadap kepada pembebasan. Freire menganggap “*education as the critic of freedom*”—menempatkan pendidikan pada sebuah ruang yang ideal. Pembebasan dapat dimaknai sebagai sebuah bagian dari wujud kemandirian, kemerdekaan, dan keluar dari belenggu-belenggu yang selama ini menjerat dirinya. Posisi pendidikan menjadi jangkar utama dalam ruang sosial, yang pada gilirannya harus ditempatkan di dalam metode yang dialogis—tidak mengutamakan pada pengajar sebagai yang punya ilmu segala namun diletakkan pada fasilitator.

Dominasi pengajaran gaya bank dengan arus utama transformasi pengetahuan dari guru dan murid menurutnya harus disisihkan. Pendidikan yang memfokuskan pada hubungan tiga aspek yaitu guru, murid dan realitas yang tidak pernah menemui titik temu yang bersinergi. Dalam praktiknya pendidikan seperti ini hanya akan menghasilkan individu-individu yang tertindas. Tugas-tugas seorang pengajar yang ideal diharapkan mampu menemani tumbuh kembang murid dan sebai teman diskusi yang mengantar mereka pada tataran pemikiran yang kritis dan reflektis.

Telaah untuk melihat konflik pada dimensi keruangan itu dapat diteropong dengan menggunkan konsep dari Henri Lefebvre (Pongoh et al., 2022): Ruang yang dipraktikkan (Spatial Place), Representasi Ruang (Representations of Space), Ruang Representasional (Representational Spaces). Dalam ruang yang dipraktikkan merupakan serangkaian masyarakat khususnya para pendatang yang dialami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Pulau Semujur. Hal selanjutnya merupakan Representasi Ruang yang dikonseptualisasikan oleh ahli penata ruang pemilik kebijakan dan regulasi dan penguasa, hal ini dapat dikatakan sebagai ruang yang dominan. Terakhir mengenai Ruang Representasional dalam pengertian yang lebih jauh sebagai ruang yang dipersepsikan melalui, simbol-simbol, gambar dan perasaan berdasarkan penghayat ruang di dalamnya atau bisa diistilahkan sebagai ruang yang dihidupi.

Dalam pemilihan ruang atau *social place* di sini mengambil tempat Pulau Semujur. Pada penelitian ini memberi fokus penuh di tempat atau sebuah produksi ruang dalam pulau. Pulau yang berpenghuni tidak terlalu banyak tetapi bisa dilihat ada yang menarik di situ yaitu bagaimana dimensi konflik yang tidak padat namun masih terdapat permasalahan keruangan di situ. Sebagaimana, masyarakat pada umumnya yang mempraktikkan keruangan dengan berbagai macam cara termasuk mobiltas bekerja sebagai nelayan, mengkases layanan sebagai hak dasar dan rutinitas lain di Pulau Semujur. Pada hal yang lain, proses-proses produksi keruangan terdapat di ruang yang padat kemudian konflik keruangan itu akan muncul, namun Pratik keruangan di sini sangat berbeda jauh. Kehadiran Representasi Ruang sebagai ruang yang dominan—ruang yang dikendalikan oleh pemilik kuasa, kebijakan dan pemegang wewenang perencanaan ruang masih menjadi pertanyaan seberapa jauh untuk bisa hadir dalam penghuni ruang itu. Dengan begitu teori dari Henri Lefebvre triadic spce ini akan menguji bagaimana negara mengkonsepsikan Ruang pada sebuah pulau terpencil dengan bagaimana masyarakat mempraktikkan pulau itu sebagai sumber mobilitas dalam mencari nafkah.

Penelitian terkait mengenai keruangan dari konsep teori Henri Lefebvre mengenai produksi ruang oleh (Anjarwati et al., 2024) dengan judul “Produksi Ruang Publik Pedesaan Sebagai Destinasi Wisata” yang memiliki tujuan di penelitian ini. Dengan memfokuskan pada kajian produksi ruang publik di kawasan pedesaan Munchar dengan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre dan upaya lainnya yaitu menjaga dan memanfaatkan ruang publik sebagai keberlangsungan masyarakat baik itu dalam skala individual atau kelompok. Di mana penelitian

ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode pengambilan data melalui wawancara yang mendalam juga observasi. Telaah mengenai ruang juga datang dari (Isvara & Ismoyo, 2025) dengan judul penelitian “Seni dan Demokrasi: Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Sarana Ekspresi, Perlawanan, dan Advokasi oleh Komunitas Taring Padi”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi komunitas taring padi sebagai upayanya dalam memanfaatkan seni sebagai medium perjuangan hak-hak masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara yang mendalam dengan komunitas, kemudian studi arsip karya Taring Padi. Hasil penelitian ini mengungkapkan jika komunitas dari Taring Padi berhasil untuk memanfaatkan seperti seni mural, poster, atau baliho sebagai media yang efektif dalam menyuarakan isu-isu sosial dan politik. Di kemudian penelitian serupa tentang pulau kecil yang menganalisis mengenai konsep keruangan dengan judul “Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan”. Penelitian dari (Christian & Desmiwati, 2018) meninjau ulang bagaimana informasi sejarah konflik dan membangun dalam suatu proporsi teoritis menggunakan telaah teoritis karya Henri Lefebvre. Pada penelitian ini juga menganalisis, mengenai relasi antara produksi ruang abstrak dan perampasan urbanisasi pada ruang kapital. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan jika ada kontestasi tidak seimbang antara konflik ruang di Pulau Pari yang sangat memarginalkan masyarakat lokal dan perubahan ruang insular menjadi ruang berbasis privat yang tidak tepat dengan kecenderungan ekspansif secara geografis. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif induktif dengan perumusan teori dan konsep fakta-fakta dan gejala empiris pada khusus konflik agraria di Pulau Pari.

Dari pemambaran diskusi penelitian di atas yang telah merumuskan konsep-konsep keruangan dari ruang Rural, Ruang marginal dan Ruang Ruang publik. Dalam telaah penelitian ini memberi fokus pada ruang yang tidak padat akan penduduk, namun kekuatan yang dimunculkan dalam penelitian ini merujuk pada representasi ruang kuasa yang memiliki dampak terhadap penghuni praktik keruangan yang dihidupi dan ditinggali. Di kemudian letak penelitian ini memiliki perbedaan yang kebanyakan menelisik produksi-produksi ruang di kota dan ruang dengan tingkat kepadatan dari *inhabitans*.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab rumusan penelitian ini, peneliti menelaah menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diperlukan untuk bisa mendeskripsikan terhadap praktik keruangan dan hubungannya dengan ruang yang dinamis representasi ruang. Menurut Gillis dan Jackson (dalam Fibrianto dan Yuniar) penelitian dengan metode deskriptif kualitatif berusaha untuk menggabungkan metode dan juga Teknik yang terdiri dari observasi, dokumentasi, analisis dan interpretasi atas sebuah makna yang berada pada masyarakat. Dalam pengumpulan data di penelitian ini terdapat dua yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Teknik wawancara dan observasi sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan penelitian yang relevan sebagai sumber sekunder.

Dalam Teknik wawancara dilakukan kepada informan di Pulau Semujur sebagai bagian dari kelompok yang rentan atau masyarakat tepi. Selanjutnya, dalam tahap observasi dilakukan dengan cara berkunjung di tempat tersebut dengan pengamatan jeli terhadap keadaan sebenarnya. Pada tahapan dokumentasi dan juga teknik pengumpulan studi pustaka terkait dengan informasi yang berkaitan dengan *inhabitans* atau users di Pulau Semujur. Di tahapan analisis, dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta mengidentifikasinya sesuai dengan konsep teori dari Henri Lefebvre “*Conceptual Triad of Social Space Production*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Place Making* Penghuni Pendatang sebagai Pelaku Praktik Keruangan vis a vis Representasi Ruang Penguasa**

Hadirnya pendatang luar yang membuat dan membentuk ruang turut andil dalam menciptakan ruang yang dinamis, ruang yang bergerak dan ruang yang dihidupi. Dalam riwayatnya penghuni atau pendatang menciptakan keruangan yang mempunyai interaksi dari pertemuan dari beragam usia, gender dan status sosial. Dalam mode produksi keruangan itu, ruang sosial dipertimbangkan sebagai desakan-desakan produksi dan produksi makna di antara relasi-relasi hubungan sosial dan yang mereka produksi (Lefebvre et al., 2009).

Dalam interaksi yang ditemukan dan ditemui terdapat beberapa aktivitas dari masyarakat di pulau semujur sebagai pendatang, penghuni dan sekaligus user di ruang-ruang publik yang strategis di mana terdapat kepadatan interaksi yang terjadi. Pada tingkat pola-pola interaksinya, aktivitas keruangan sangat beragam, intensitas-intensitas praktik ruang yang terjadi sangat tergantung terhadap waktunya. Hal selanjutnya dalam pokok pembahasan di lingkup keruangan beserta konfliknya yang dibagi menjadi irisan-irisan teori keruangan dari yang pertama *Spatial Place* atau dapat dikatakan sebagai bentuk mobilitas para pendatang di Pulau Semujur. Praktik-praktik keruangan ini merujuk terhadap kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam area atau kegiatan rutin yang sering dilakukan. Kegiatan atau aktivitas itu dapat dilihat secara nyata dalam masyarakat berkehidupaj melakukan matapencahariian secara tetap dan mereka tinggal sehari-hari di Pulau Semujur. Berikutnya, merupakan *representational of space* di mana menggambarkan keadaan-keadaan fisik yang masyarakat lihat atau representasi keruangan dari ruang kuasa. Mengenai *representational space*, dapat merujuk terhadap ruang yang dipersepsualkan oleh penghuninya, ruang sebagai bentuk dari pengalaman-pengalaman subjek atas ruang itu baik sebagai adaptasi, harapan dan atau bahkan hambatan dari penghuninya.

Keadaan-keadaan fisik yang dapat diperlihatkan dari bagian mengenai representasi ruang dalam hal ini ialah ruang-ruang penguasa. Di Pulau Semujur memperlihatkan adanya ruang penguasa sebagai representasi keruangan yang bisa dijumpai seperti pada layanan publik yaitu KUA, Puskesmas, kantor desa. Pusat-pusat layalanan publik di sini masih terpusat pada area terkonsentrasi di Tanjung Gunung. Dalam sebuah peta perencanaan sendiri Pulau Semujur merupakan pulau kecil dan sebagai tempat hunian untuk keberlangsungan hidup sehari-hari kurang layak untuk dihidupi. Pola kerentanan akan terlihat ketika Kartu Tanda Penduduk atau KTP sebagai alat negara dalam mengatur dan merepresentasikan warganya dalam ruang. Peristiwa yang dimungkinkan yaitu status para penghuni yang mayoritas adalah pendatang dan mereka tidak mempunyai KTP sebagai alat negara dan wujud representasi warga untuk mengatur dalam ruang, jika mereka tidak mempunyai administrasi tersebut dapat diartikan warga negara di situ tidak ada dalam ruang yang diatur oleh penguasa. Di kemudian mereka menemui kesulitan dalam akses-akses layanan Kesehatan, sosial, dan juga pendidikan. Secara administrtif sendiri Pulau Semujur statusnya “tidak ada” dan statusnya ambigu “secara administrasi masuk ke daerah mana karena terus berpindah pindah (Labulaeksa). Ruang-ruang yang telah direncanakan atay dikonseptualisasi di sini merupakan bagian dari identifikasi dan kategori-kategori mengenai ruang yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemegang kendali ruang. Lefebvre memberi telaah itu sebagai berikut:

Conceptualized space, the space of scientists, planners, urbanists, technocratic subdividers, and social engineers, as of a certain type of artist with a scientific bent—all of whom identify what is lived and what is perceived with what is conceived. (Arcane speculation about Numbers, with its talk of golden numbers, moduli, and ‘canons’, tends to perpetuate

this view of matters). This is the dominant space in any society (or mode of production). Conceptions of space tend, with certain exceptions to which I shall return, towards a system of verbal (and therefore intellectually worked out) signs (Lefebvre, 1991, 1991, P. 38)

Para pendatang yang berasal dari luar Pulau Semujur dan pendatang-pendatang yang datang dengan agenda-agenda pribadi dan meletakkan harapan-harapan di Pulau itu untuk mendapatkan kenyataan yang lebih baik, hal ini bisa disepakati dengan napa yang dinyatakan oleh (Biagi, 2020) bahwa yang kaum migran atau representasi di sini adalah pendatang telah mengalami apa yang diistilahkan sebagai “double absence”. Mereka para pendatang dari pulau lain mempunyai misi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sementara itu di Pulau Semujur sendiri, mereka mengalami sebuah kitakdakadilan, situasi yang rentan, dan dipandang sebagai orang yang tidak setara atau ditiadakan di dalam ruang itu untuk diatur. Dan mirisnya, mereka menghadapi apa yang dinamakan dengan eksklusi sosial.

a. Sebuah Ruang yang Dipraktikan: Realitas ruang yang dihidupi

Tampak dalam menjumpai ruang menurut Henri Lefebvre yang melihat perkembangan-perkembangan ruang-ruang kota yang tak hanya di wilayah urban sendiri, melainkan Lefebvre memiliki ketertarikan untuk melihat di wilayah kelompok pinggiran (*periphery*). Pada tafsir yang dimungkinkan ini, kelompok pinggiran atau *periphery* dilihat bukan masyarakat yang hidup pada wilayah suburban, namun lebih jauhnya dimaknai sebagai kelompok yang rentan terhadap adanya eksklusi dari penguasa. Artinya mereka telah mengalami apa yang namanya ketidakadilan, proses pembangunan penataan ruang fisik untuk layanan yang tidak terpadu membuatnya tidak mendapat hak yang sepatutnya.

Konkritisasi praktik keruangan yang ada di Pulau Semujur atau ruang yang dipraktikan masyarakat itu dijumpai pada aktivitas-aktivitas masyarakat secara nyata yang tinggal pada area itu. Bisa disebutkan jika dalam kehidupan sehari-hari mobilitas di situ sepertihalnya adalah seorang nelayan, kemudian rutinitas mengolah ikan asin sebagai bagian dari turunan hasil tangkap ikan. Selain daripada itu mobilitas lain yang menggantikan jalan sebagai representasi ruang yang sibuk, praktik keruangan digantikan dengan menyeberang ke Tanjung Gunung. Mobilitas dalam menyeberang ke Tanjung Gunung merupakan jalur paling cepat untuk menghubungkan ruang hidup mereka yaitu Pulau Semujur dengan ruang administrasi Tanjung Gunung. Inilah identifikasi yang terjadi dari bentuk Spatial Place seperti yang dinyatakan oleh Lefebvre:

“The spatial practice of a society secretes that society’s space; it propounds and presupposes it, in a dialectical interaction; it produces it slowly and surely as it masters and appropriates it. From the analytic standpoint, the spatial practice of a society is revealed through the deciphering of its space” (Lefebvre, 1991, P. 38)

Ruang spasial atau praktik keruangan ditujukan dalam ruang sosial di mana didalamnya dimungkinkan dengan adanya interaksi secara dialektis dan pada produksinya yang cenderung melamban namun bergerak dinamis. Karenanya praktik keruangan sangat dekat dengan interelasi pada beberapa kepentingan bermacam pihak. Berbagai macam pihak di situ selalu menyimpan interest atau kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan mereka saling berupaya untuk mewujudkan cita-cita keinginan masing-masing. Disinilah, sering terjandinya konflik dan benturan kepentingan di ruang sosial. Dari konflik yang muncul tersebut, kelompok-kelompok yang terpinggirkan selalu menjadi korban dan tersisih (Sugiyono, 2022).

Secara sosial dengan dasar praktik-praktik yang terjadi, proses keruangan itu akan terus diproduksi dan direproduksi terus-menerus secara kontinyu. Mereka dalam lingkup yang paling dekat membangun praktik keruangan dalam bentuk fisiknya berupa mushola sebagai bagian dari

proses-proses interaksi atau tempat interelasi itu dimungkinkan di area yang strategis. Tempat peribadatan ini menjadi contoh yang konkret akan adanya praktik ruang, (Zieleniec, 2018) menyatakan bahwa praktik spasial memberi gambaran mengenai “struktur dalam kehidupan sehari-hari pada realitas masyarakat yang membentuk kohesi sosial, keberlanjutan dan kompetensi sosial tertentu.

b. Menemui Budaya “Bisu”, Mengungkap Kerentanan

Dimensi ruang turut mengantarkan pada masyarakat pendatang yang pada asas bahasa menunjuk kepada bahasa kekuasaan. Di mana “pendatang” merupakan kalimat kekuasaan yang melihat masyarakat tersebut tidak layak untuk menjadi orang yang permanen. Mereka memiliki status yang rentan, meski sudah bertahun-tahun menjadi warga di pulau itu dan memberdayakan dirinya sebagai bagian dari warga yang sah secara administrasi. Kata “pendatang” atau “lokal” dan “penduduk asli” semakin melegitimasi serta membernarkan jika mereka memang hanya penduduk yang sementara, mereka sah untuk dibenarkan dalam layanan publik sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mempunyai status yang penuh. Kekuasaan yang tidak terlihat ini terus mengalami produksi-produksi yang tidak terlihat dan bahasa semakin mengukuhkan dirinya dalam melanggengkan ketimpangan.

Pada Budaya Bisu yang administratif pun bisa ditemukan beberapa narasumber yang menjawab dengan sadar atau tidak sadar dengan kata “tidak tahu”. Artinya bahasa yang merekonstruksi pikiran bukan tentang pengetahuan mereka yang rendah tetapi diakibatkan pada sistem birokrasi atau sistem geografis yang memaksa mereka untuk tidak mempunyai akses “mengetahui” mengenai prosedur-prosedur dalam memperoleh layanan yang memadai untuk mengakses layanan. Pada posisi-posisi mereka sebagai “pendatang” yang tidak diakui secara penuh tidak layak untuk memperoleh hak-haknya untuk sebuah akses layanan.

Di satu sisi pendidikan yang masih tersentralisasi di Tanjung Gunung, lokus keberadaan mereka sebagai subjek yang terlibat masih sangat minimal dan bukan menjadi pelaku subjek politik yang tidak hanya pasif namun menjadi bagain subjek politik aktif untuk menentukan tujuan bersama dalam bernegara. Misal saja apa yang dikatakan oleh Labulaeksa “Masyarakat pulau semujur kurang terlibat dalam kegiatan politik” dan Rosdinda “tidak akan terlibat dalam musyawarah”. Indikasi-indikasi ini menjadi lebih terang dan kentara bila dilihat lebih dekat, masyarakat di tempat itu tidak menjadi subjek aktif dalam keterlibatan pesta politik misalnya, agenda lima tahunan yang menjadi proses demokrasi dipraktikan oleh bangsa ini. Subjek-subjek itu menjadi diam seperti dibungkam dalam ruang kedap, mereka tidak bisa bersuara atau suara mereka memang sengaja ditiadakan pada birokrasi-birokrasi yang tidak memihak pada masyarakat yang setara. Pada yang seharusnya pendidikan menjadi (*political act*) sebagai yang berkaitan dengan produksi, kesehatan, hukum dan rencana atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (Freire, 2000)

Alih-alih menghilangkan sikap yang superioritas, keadaan yang mempunyai dominiasi pengetahuan dan menganggap segalanya dari contoh proses untuk mendarat ke intitusi representasi ruang kuasa yaitu sekolah yang memerlukan adanya KTP untuk bisa menjadi murid. Dalam kasus seperti ini, tidak memeprihatikan keadaan yang berimbang anantara penguasa dan penghuni ruang itu, apa yang diistilahkan mirip sepertihalnya dalam padangan Friere mengenai pendidikan “gaya bank” *banking concept of education* . Proses komunikasi dialogis yang tidak menyentuh di dasar sosial, membuat penanganan mengenai status untuk KTP itu hanya dipasrahkan begitu saja. Mendekatkan pada hal yang lebih dialogis dengan masyarakat yang menjadi subjek bukan hanya objek yang harus berterima dan selama ini masih terjadi dan belangsung—mereka yang terus menerus menyesuaikan diri. Apa yang diperlihatkan di sini menjadi gambaran untuk masyarakat juga turut terlibat, turut berdialog persis sebagaimana penekanan pada pendidikan hadap masalah

.....

yang melihat pada sebuah realitas akan dunia luar sebagai bahan pokok masalah yang dibahasakan secara lain atau pendidikan yang berbasis lingkungan dan kemasyarakatan (Pongoh et al., 2022).

c. Bahasa, Multikultural dan Ruang yang Dipersepsualkan sebagai Harapan

Melihat realitas yang ditampilkan dari Pulau Semujur yang memiliki keberagaman dari penghayat ruang itu dengan berbagai latar. Pulau Semujur bisa diidentifikasi sebagai miniatur Indonesia dengan memiliki keberagaman yang multicultural. Adanya multicultural itu bisa dilihat dari masyarakat yang datang dari Bangka, Baubau dan juga Buton. Di antara kultur itu ada kelompok-kelompok yang rentan yang mengalami ketimpangan kelas sosial. Ketidakhadiran ruang penguasa representasi dari pendidikan misalnya yang hanya tesentralisasi di Tanjung Gunung menempat Pulau Semujur sebagai ruang yang krisis akan “kurikulum”

Kurikulum di sini mengarah terhadap buta konteks, di mana sekolah tidak terjangkau di Pulau Semujur sendiri. Menjadikan lanskap Pulau Semujur ekstrem dalam sistem pendidikan untuk bisa dinikmati dan menjadi masyarakat yang kritis dalam konteks masyarakat majemuk dan letak geografisnya. Sistem pendidikan yang bisa hadir di pulau itu, bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Alih-alih mereka bisa mengakui dari dirinya dan lingkungannya terpaksa harus memaksakan diri untuk berasimilasi dan meninggalkan ruang hidupnya, ruang yang dipraktikkan dan dihidupi melalui praktik-praktik keruagann dan aktivitas-aktivitas *daily practice*—demi mengakses sebuah pendidikan yang layak.

Bahasa kuasa yang dimunculkan sebagai pembatas atau benteng penguasa mengucilkan pada mereka yang memiliki keterbatasan pada masyarakat yang terbatas pada paparan pendidikan. Bahasa-bahasa yang eksklusif misalnya: saat mengurus proses administrasi harus “mengajukan ke camat” atau bisa dimunculkan juga bahasa eksklusif itu pada “surat domisili” menjadi bahasa yang menakut-nakuti dikarenakan masyarakat pada letak di geografis itu memiliki keterbatasan di latar belakang pendidikan. Bahasa di sini memperkokoh posisinya yang lekat dengan penguasa dengan birokrasi-birokrasi asing di mana masyarakat tidak paham dan menjangkau persoalan itu. Maksud di situ melegitimasi keadaan ketertimpangan dan mengecualikan mereka dalam membentuk tembok kekuasaan dan melarang untuk menguasainya.

Kerentanan-kerentanan lain yang dijumpai selain daripada bahasa sebagai kekuasaan, ruang di Pulau Semujur juga menggeser terhadap ruang sebagai tempat yang rentan. Ruang yang representasional ini menggambarkan terhadap situasi mengenai penghuni atau penghayat keruangan atau subjek-subjek yang memiliki perpektif pengalaman keruangan yang selama ini tumbuh dan berproses di area itu.

“Space as directly lived through its associated images and symbols, and hence the space of ‘inhabitans’ and ‘users’ but also of some artists and perhaps pf those, such as a few writers and philosophers, who describe and aspire to do not more than describe. This is dominated—and hence passively experienced—space which the imagination seeks to change and appropriate. It overlays physical space, making symbolics use of these objects. Thus representational space may be said, though again with certain exceptions, to tend towards more or less coherent systems of non-verbal symbols and signs” (Lefebvre, 1991, p. 39)

Menurut Sarmila “Tidak dipersulit untuk mengurus identitas diri dan layanan publik”

kalimat ini menegaskan pada ruang yang penuh dengan hambatan dan rintangan. Ada sebuah harapan, harapan untuk menjangkau dengan yang lebih ideal di masa depan atau setidaknya terdapat proses yang lebih baik, ruang kuasa lebih lebur lagi untuk dijangkau. Selanjutnya konflik ruang yang terjadi yang mana masyarakat harus menepatkan mereka terhadap lingkungan yang lain pada penggalan wawancara Labukalaesa “Jenazah yang tidak bisa dikubur di Tanjung Gunung”. Penolakan itu merupakan wujud adanya sebuah konflik yang terjadi antara ruang yang dihidupinya yaitu Pulau Semujur dengan ruang administrasi penguasa yaitu di Tanjung Gunung. Pada keadaan tak berdaya bahkan di hadapkan pada kematian yang sudah tidak mempunya kekuasaan bertindak pun tetap mengalami penolakan karena hambatan administrasi.

Peristiwa penguburan calon jenazah menjadi contoh yang konkret bagaimana tubuh yang sewaktu masih hidup dirinya memberi persepsi-persepsi tentang ruang yang ideal dan Semujur menjadi bagian dalam dirinya yang mempersepsualkan ruang. Tubuh tanpa daya itu menjadi bukti puncak konflik keruangan yang terjadi antara yang administratif yaitu Tanjung Gunung: representasi dari penata ruang, teknokrat, perencana keruangan memberi hambatan yang begitu terjal. Masyarakat niscaya harus menciptakan ruangnya sendiri yang Representasional di Semujur, dan sekaligus menjadi nisan atau prasasti pengingat bagi mereka yang terus-menerus mengalami kekalahan dan keterpinggiran.

Ruang harapan dari adaptasi masyarakat menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka untuk menjani praktik-praktik kehidupan keruangan yang memiliki keberagaman multikultural dari beberapa etnis yang tinggal di Pulau Semujur. Ruang adaptasi dan ruang harapan itu menjadi aspirasi bersama dan menyatukan yang harmonis. Misalnya, menurut (Sarmila) “Dengan menyamaratakan antara penduduk lokal dan pendatang” telah menekankan bukti tentang sebuah ruang yang diimajinasikan—mereka dapat membangun ruang yang adil—sebuah ruang representasional yang bisa dirasakan dan hidup pada ruang harapan yang ideal. Selanjutnya, menjalin kerekatan sosial mereka dalam membangun ruang sosial dengan saling membantu jika ada yang terkena musibah yang diketahui oleh RT di tengah letak geografis mereka yang terpinggirkan.

Hal yang multicultural itu bisa menjadi konsolidasi bersama dalam membangun ruang dengan mengutamakan nilai hormat dan menghargai antar sesama. Mereka bisa membagikan dan belajar tentang pengetahuan lokal dalam hal perikanan dan hasil tangkap. Namun, pendidikan juga perlu hadir di tengah mereka untuk mengkritisis struktur ketimpangan yang sudah mereka alami dari kebijakan birokrasi dan struktur yang meminggirkan mereka.

KESIMPULAN

Masyarakat pulau semujur dengan latar belakang yang multikultu dari beberapa etnis di Indonesia telah memproduksi ruang secara terus menerus secara dinamis dengan memberi penghayatan, pemakanaan dan p-enghidupan. Mereka mempraktikan keruangan itu dari aktivitas yang dialami baik mobilitas di area pusat layanan administrasi atau aktivitas fisik dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terjadinya konflik keruangan mereka diakibatkan ruang representative dari penguasa yang tidak hadir dan masih terpusat di Tanjung Gunung dan ruang administratif yang ada di Pulau Semujur. Mereka juga mengalami adanya budaya “bisu” meskpun sudah beberapa tahun tinggal di ruang itu namun masih terdapat penyebutan-penyebutan untuk

“pendatang” “lokal” dan “penduduk asli” hal ini menjadi identifikasi jika mereka tidak mempunyai hak yang penuh untuk memperoleh layanan, terlihat bahwa batas dan beteng kekuasaan terus dibentuk dengan cara-cara yang tidak terlihat dan mereka dilegitimasi untuk tidak memperoleh administrasi yang layak.

Lanskap Pulau Semujur yang dipotret melalui lensa pendidikan seperti sekolah juga tidak hadir dalam pulau itu di tengah kerentanan mereka terhadap akses pendidikan yang memadai. Alih-alih mereka mendapatkan kurikulum dari pengetahuan lokal dan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan dekat dengan dirinya, terpaksa harus berasimilasi untuk keluar dari pulau itu demi sebuah pendidikan. Masyarakat multicultural yang beragam itu menjadikan Pulau Semujur menjadi bagian ruang yang dipersepsualkan dari pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka terima, menjadi harapan untuk saling menguatkan dalam kondisi-kondisi duka pada ruang sosial.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut berkontribusi signifikan terhadap kelancaran proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anjarwati, A., Purnomo, D., & Suryo, S. H. (2024). *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 1–12.
- Biagi, F. (2020). *Henri Lefebvre's Critical Theory of Space*. Springer International Publishing AG.
- Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.45-63>
- Freire, P. (2000). *Pendidikan sebagai proses: Surat-menyurat pedagogis dengan para pendidik Guinea-Bissau*. Pustaka Pelajar.
- Freire, P., Illich, I., & Fromm, E. (2015). *Menggugat pendidikan: Fundamentalis, konservatif, liberal, anarkis* (Cetakan 8). Pustaka Pelajar.
- Isvara, A. L., & Ismoyo, S. L. (2025). Seni dan Demokrasi: Pemanfaatan Ruang Publik sebagai Sarana Ekspresi, Perlawanan, dan Advokasi oleh Komunitas Taring Padi. *Irama: Jurnal Seni, Desain Dan Pembelajarannya*, 7(1), 8–24. <https://doi.org/10.17509/irama.v7i1.80314>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell.
- Lefebvre, H., Brenner, N., & Elden, S. (2009). *State, space, world: Selected essays*. University of Minnesota Press.
- Pongoh, D., Lumapow, H. R., Lengkong, J. S. J., Rotty, V. N. J., & Tuerah, I. J. C. (2022). Sumbangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Paulo Freire Bagi Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia. *Media (Jurnal Filsafat Dan Teologi)*, 3(1), 103–115. <https://doi.org/10.53396/media.v3i1.57>
- Soja, E. W. (Author). (n.d.). *My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization*.

- Sugiyono, P. B. (2022). MEMAHAMI KONSEP RUANG MENURUT HENRI LEFEBVRE. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 6(No. 2), 101–113.
- Zieleniec, A. (2018). Lefebvre's Politics of Space: Planning the Urban as Oeuvre. *Urban Planning*, 3(3), 5–15. <https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1343>